

Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Potensi Peternakan Sapi Sebagai Sumber Peningkatan Ekonomi Desa

Mike Oktapia¹, Yahnu Wiguno Sanyoto², Aprilia Lestari³

^{1,2,3}) Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum
Universitas Baturaja

Jl.Ratu Penghulu Karang Sari No.02301, Telepon (0735) 326122, Fax.321822, -32115 OKU Sumatera Selatan
Email :oktapiamike@gmail.com¹, yahnoe@yahoo.com², yarie2104@gmail.com³

ABSTRACT

This study examines the urgency of collaborative governance in optimizing the cattle farming sector in Merbau Village, Lubuk Batang District, Ogan Komering Ulu Regency. It found a contradiction between the village's significant economic potential, where 65% of households (388 households) own cattle, and the traditional free-grazing management system that has been practiced for generations. Therefore, this study aims to analyze the forms of collaboration between the village government and the community and to identify the supporting and inhibiting factors affecting such collaboration. This research employed a descriptive qualitative method with a development approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation, and were analyzed using the IFAS and EFAS matrices based on SWOT analysis. The findings indicate four pillars of collaboration: transformative leadership has emerged, although technical assistance remains limited; trust has been built through village deliberations and profit-sharing mechanisms despite limited transparency; communication has been conducted through village forums and digital media but still faces coordination challenges; and commitment has been formalized but is not yet supported by strong village regulations. Supporting factors include social capital, Village Fund support, and the national food security policy, while inhibiting factors include individualistic culture, limited technical assistance, and livestock health risks. The study concludes that collaboration between the village government and the community in developing the cattle farming sector has been implemented but has not yet reached its optimal level. Therefore, village regulations and strengthened capacity of field facilitators are needed. This study is limited because it was conducted in only one village using a qualitative approach; therefore, its findings cannot be generalized to other areas. Future research is recommended to conduct comparative studies across several villages or apply mixed-methods or quantitative approaches to provide a more comprehensive understanding of the effectiveness of collaborative governance in developing the cattle farming sector as a foundation for the local economy.

Keywords: Collaborative Governance, Cattle Farming, Merbau Village, SWOT Analysis.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi tata kelola kolaboratif dalam optimalisasi sektor peternakan sapi di Desa Merbau, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ditemukan adanya kontradiksi antara potensi ekonomi yang besar 65% kepala keluarga (388 KK) memiliki ternak dengan pola pengelolaan tradisional “lepas-liar” yang telah dilakukan secara turun temurun oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan pembangunan, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan matriks IFAS dan EFAS berbasis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan empat pilar kolaborasi: kepemimpinan transformatif telah muncul namun pendampingan teknis masih lemah; kepercayaan terbangun melalui musyawarah dan sistem bagi hasil meski transparansi terbatas; komunikasi berjalan melalui forum desa dan media digital tetapi masih mengalami hambatan koordinasi; serta komitmen telah diformalisasi namun belum didukung regulasi desa yang kuat. Faktor pendukung meliputi modal sosial, dukungan Dana Desa, dan kebijakan ketahanan pangan nasional, sedangkan hambatan mencakup budaya individualistik, minimnya pendampingan teknis, dan risiko kesehatan ternak. Penelitian menyimpulkan bahwa kolaborasi telah berjalan namun belum optimal, sehingga diperlukan Peraturan Desa dan penguatan kapasitas fasilitator lapangan. Penelitian menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan potensi peternakan sapi di Desa Merbau telah berjalan, namun belum optimal sehingga diperlukan Peraturan Desa dan penguatan kapasitas fasilitator lapangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu desa dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke wilayah lain. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan kajian komparatif pada beberapa desa atau menggunakan pendekatan mixed methods maupun kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas tata kelola kolaboratif dalam pengembangan peternakan sapi sebagai basis ekonomi lokal.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Peternakan Sapi, Desa Merbau, Analisis SWOT.*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya dan potensi lokal secara mandiri. Pemanfaatan potensi desa yang optimal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Menurut Agus Dwiyanto (2011) keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada peran pemerintah desa, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan dapat menciptakan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Kondisi tersebut mendorong terciptanya pembangunan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Konsep collaborative governance menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa collaborative governance merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan lembaga pemerintah dan aktor nonpemerintah secara bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan publik. Pendekatan ini menempatkan komunikasi, kepercayaan, dan komitmen sebagai unsur penting dalam membangun kolaborasi yang efektif.

Desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki potensi peternakan sapi yang cukup besar dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Ketersediaan lahan serta sumber pakan ternak menjadi modal yang mendukung pengembangan sektor peternakan. Potensi tersebut memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat apabila dikelola secara optimal melalui kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Pengembangan peternakan sapi di Desa Merbau masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan peternakan yang masih tradisional, serta keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan potensi peternakan sapi sebagai sumber peningkatan ekonomi desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan potensi peternakan sapi sebagai sumber peningkatan ekonomi desa di Desa Merbau. Kajian difokuskan pada kondisi awal kolaborasi, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif berdasarkan teori Ansell dan Gash. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola kolaboratif serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Collaborative Governance

Collaborative Governance Menurut Ansell dan Gash (2008), merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan publik. Kolaborasi ini dilakukan melalui komunikasi yang baik, transparansi, kepercayaan, dan pengambilan keputusan secara bersama agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif.

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa menurut Taliziduhu Ndraha. (2003), berperan sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan, serta memberdayakan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa harus menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat menurut I Nyoman Sumaryadi.(2005) merupakan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi yang aktif akan meningkatkan keberhasilan pembangunan karena masyarakat menjadi subjek yang ikut menentukan kebijakan sesuai kebutuhan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Sutoro Edi (2008) mengatakan proses meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki serta meningkatkan kesejahteraannya. Pelaksanaannya harus dilakukan

secara partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengembangan Potensi Masyarakat

Pengembangan Potensi Masyarakat Menurut Soetomo (2012) merupakan upaya mengoptimalkan sumber daya dan potensi lokal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta dukungan pemerintah, kelembagaan, dan infrastruktur. Sinergi antara faktor internal dan eksternal menjadi kunci keberhasilan pengembangan potensi masyarakat.

Pemberdayaan Ekonomi Desa

Pemberdayaan Ekonomi Desa Mardikanto dan Soebiato (2015) menjelaskan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi desa, khususnya sektor peternakan sapi. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas peternak, penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, dan pembangunan kemitraan.

Analisis SWOT

Analisis SWOT menurut Freddy Rangkuti (2016) merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan sektor peternakan sapi. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengembangan yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal desa.

III. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menurut Moleong, Lexy J. (2017) untuk memahami kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan potensi peternakan sapi di Desa Merbau, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena desa tersebut memiliki potensi peternakan sapi yang cukup berkembang.

Menurut Arikunto (2010) mengatkan data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 5 kelompok peternak dari 5 desa, dan akademisi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah desa dan literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian mengacu pada teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash yang meliputi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif. Analisis SWOT juga digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan peternakan sapi sebagai sumber peningkatan ekonomi desa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Desa Merbau dan masyarakat dalam pengembangan potensi peternakan sapi telah berlangsung melalui berbagai bentuk kerja sama yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok peternak, dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Merbau, pengembangan peternakan sapi menjadi salah satu program prioritas desa karena sekitar 65% atau 388 kepala keluarga memiliki ternak sapi. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Desa yang menjelaskan bahwa pemerintah desa telah mengalokasikan dukungan melalui program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat. Data tersebut juga didukung oleh dokumen Monografi Desa Merbau dan data desa yang menunjukkan bahwa peternakan sapi merupakan salah satu potensi ekonomi utama masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesamaan tujuan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui sektor peternakan.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD menunjukkan bahwa pelaksanaan kolaborasi dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, kelompok peternak, dan masyarakat dalam penyusunan program pengembangan peternakan sapi. Kepala Desa dan Sekretaris Desa juga menjelaskan bahwa pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dengan memberikan dukungan kebijakan, memfasilitasi koordinasi antarpihak, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintah desa telah mendorong terbangunnya komunikasi dan kepercayaan antarpihak sebagaimana dijelaskan dalam konsep Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima ketua kelompok peternak dari lima desa, diketahui bahwa kelompok peternak berfungsi sebagai wadah koordinasi, penyampaian informasi, serta sarana penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi peternak. Para informan menyampaikan bahwa pertemuan kelompok dilakukan secara berkala untuk membahas teknik pemeliharaan ternak, kondisi kesehatan sapi, serta pemasaran hasil ternak. Namun demikian, sebagian besar ketua kelompok peternak juga menyampaikan bahwa pendampingan teknis dari instansi terkait masih belum dilakukan secara rutin sehingga sebagian peternak masih menerapkan pola pemeliharaan tradisional dengan sistem lepas-liar. Hasil observasi peneliti mendukung temuan tersebut, di mana sebagian besar peternak masih memanfaatkan padang penggembalaan alami dan belum menerapkan teknologi peternakan secara optimal.

Hasil wawancara dengan akademisi menunjukkan bahwa pengembangan peternakan sapi di Desa Merbau memiliki potensi yang besar apabila didukung oleh tata kelola kolaboratif yang kuat antara pemerintah desa, kelompok peternak, dan masyarakat. Menurut akademisi,

potensi sumber daya alam, pengalaman masyarakat dalam beternak, serta dukungan pemerintah merupakan kekuatan utama yang perlu dioptimalkan. Namun demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan kelompok peternak, pendampingan teknis yang berkelanjutan, serta regulasi desa yang lebih jelas masih diperlukan agar kolaborasi dapat berjalan lebih efektif.

Data primer tersebut diperkuat oleh data sekunder berupa Monografi Desa Merbau, dokumen pemerintah desa, dan hasil analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis matriks IFAS dan EFAS, kekuatan utama pengembangan peternakan sapi meliputi tingginya kepemilikan ternak masyarakat, dukungan pemerintah desa, ketersediaan lahan dan sumber pakan, serta budaya gotong royong yang masih terpelihara. Sementara itu, kelemahan yang masih dihadapi meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya pendampingan teknis, keterbatasan modal usaha, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi peternakan. Dari sisi eksternal, peluang yang tersedia berupa dukungan kebijakan ketahanan pangan dan meningkatnya permintaan pasar terhadap produk peternakan, sedangkan ancaman yang dihadapi antara lain fluktuasi harga pasar, risiko penyakit ternak, dan perubahan kondisi ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan potensi peternakan sapi telah berjalan, namun belum optimal. Keberhasilan kolaborasi didukung oleh kepemimpinan pemerintah desa, partisipasi masyarakat, keberadaan kelompok peternak, serta potensi sumber daya yang dimiliki desa. Akan tetapi, masih diperlukan penguatan kapasitas peternak, peningkatan pendampingan teknis, penyusunan regulasi desa yang lebih kuat, serta penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan agar pengembangan peternakan sapi mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

V. KESIMPULAN

Kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan potensi peternakan sapi di Desa Merbau telah berjalan melalui musyawarah desa, pembentukan kelompok peternak, serta dukungan Dana Desa dalam program ketahanan pangan. Kolaborasi tersebut menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal.

Faktor pendukung kolaborasi meliputi modal sosial masyarakat, dukungan Dana Desa, dan kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan. Faktor penghambat meliputi budaya individualistik, pola pemeliharaan ternak yang masih tradisional, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan minimnya pendampingan teknis. Penguatan regulasi desa, peningkatan kapasitas kelompok peternak, serta penguatan komunikasi dan koordinasi antar stakeholder diperlukan agar pengembangan peternakan sapi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu desa dengan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke wilayah lain. Selain itu, analisis SWOT yang digunakan masih bergantung pada kondisi dan data penelitian di lokasi penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melakukan kajian pada beberapa desa sebagai studi komparatif atau menggunakan pendekatan mixed methods maupun kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas tata kelola kolaboratif dalam pengembangan potensi peternakan sapi sebagai sumber peningkatan ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokras*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal.56-77.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian*. Edisi Revisi VII. Yogyakarta: Rineka Cipta, hal. 265.
- Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. (2023). *Laporan Kinerja Peternakan Provinsi Sumatera Selatan 2023*. Palembang: Dinas Peternakan Provinsi Sumsel.
- Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- I Nyoman Sumaryadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama, hla. 46.
- Kurniawan, I. (2021). *Kendala Pengembangan Peternakan Sapi Rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Jurnal Peternakan Nusantara, 7(1), 78–89.
- Moleong, Lexy J. 2017&2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soetomo. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutoro Eko. (2014). *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Yogyakarta: FPPD.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Wahyuni, S. (2018). Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), hla. 89-102.